Laporan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Triwulan II
Tahun 2025



# DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
# KABUPATEN NGANJUK

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatNya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan II Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan II merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan II Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan disampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan II. Semoga laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Triwulan II Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat digunakan sebagai acuan dan perbaikan bagi kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dimasa yang akan datang.

Nganjuk,  Juni 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

**HARIS JATMIKO, S.Pd, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP.19711219 199803 1 006

# DAFTAR ISI


Halaman

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**BAB I PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang..... 1

I.2. Landasan Hukum..... 2

I.3. Maksud dan Tujuan..... 3

I.4. Sistematika Penulisan..... 3

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah..... 3

**BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TRIWULAN II TAHUN 2025**

II.1.Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 6

II.2.Analisis Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran..... 7

II.3.Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah..... 8

II.4. Analisis Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 19

II.5. Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II..... 29

II.6. Analisis Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025..... 41

**BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

III.1. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 53

III.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah..... 53

**BAB IV PENUTUP**

IV.1. Kesimpulan..... 63

IV.2. Tindak lanjut..... 64

# BAB I
# PENDAHULUAN

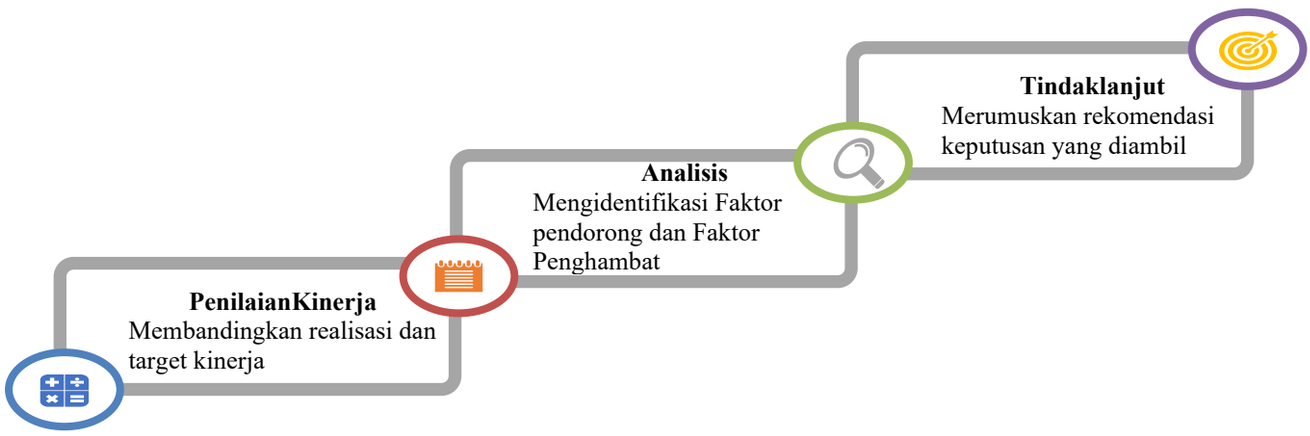
## I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan Pilihan Industri dan Perdagangan, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai triwulan II melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah**




Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

**I.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

**I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target

kinerja tujuan dan sasaran, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten NganjukTahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

## I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN,
   Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

## I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gapanalysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No. | Interval Nilai Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian Capaian Kinerja |
|---|---|---|
| 1. | ≥91% | Sangat Tinggi |

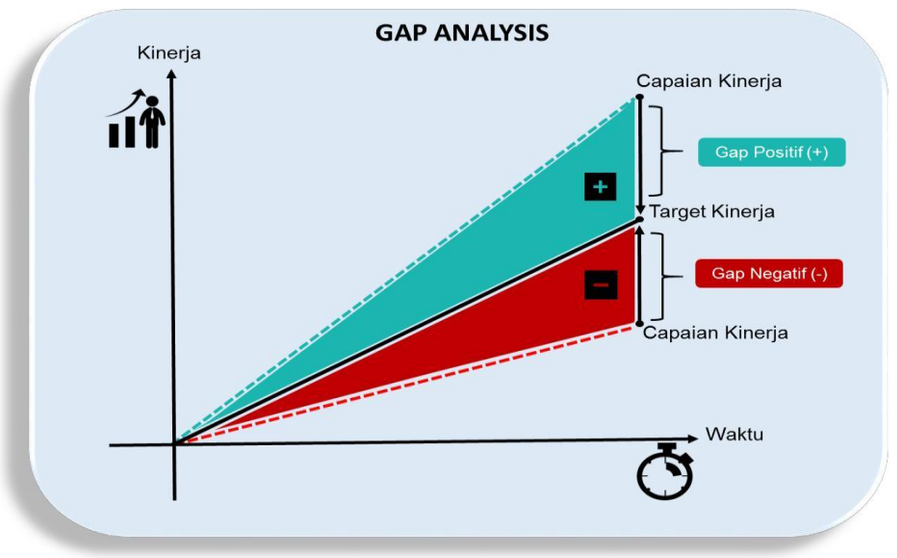
| | | |
|---|---|---|
| 2. | 76%≤90% | Tinggi |
| 3. | 66%≤ 75% | Sedang |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja.*Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

**Gambar 2.*GapAnalysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja**




*Gap* antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-).*Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target

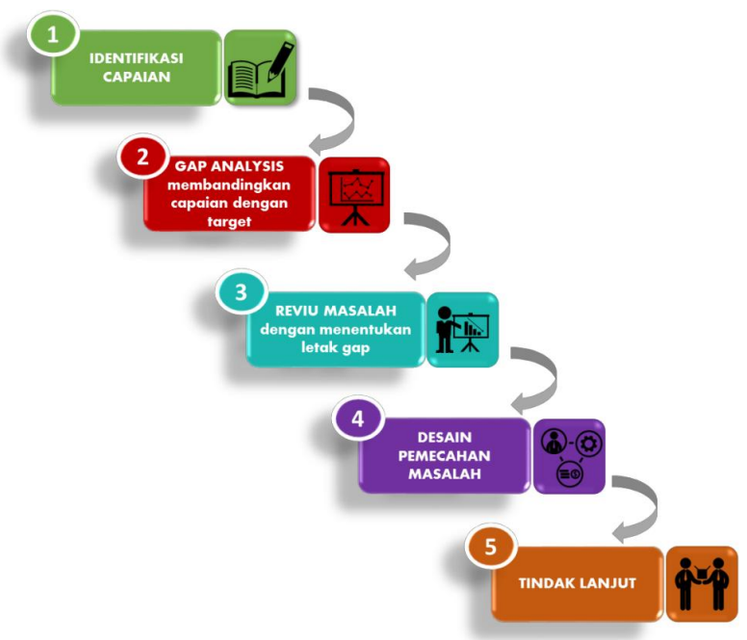
kinerja, sebaliknya *gap*akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gapanalysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.




Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *uptodate*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

# BAB II
# CAPAIAN KINERJA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TRIWULAN II TAHUN 2025

## II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Capaian kinerja Tujuan dan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut :

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator | Kinerja Tahun 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| | Tujuan Meningkatnya Produktivitas sector industry dan perdagangan | Pertumbuhan PDRB (ADHK) sector industri | 11,90 | - | - |
| | | Pertumbuhan PDRB (ADHK) sector perdagangan | 5,50 | - | - |
| | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri | Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah | 2,2% | 0,51% | 23,18% |
| | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan | Persentase Peningkatan omzet sector perdagangan | 6,2% | 2,73% | 44,03% |

II.2 Analisis Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaean

Capaian Tujuan Meningkatnya Produktivitas sector industry dan perdagangan Dengan Indikator Tujuan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Pengukurannya dilaksanakan di akhir tahun hal ini dikarenakan Data Tersebut dikeluarkan diakhir tahun/ data belum tersedia.

Tujuan Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk adalah Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan dengan 2 Sasaran Yaitu :

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dengan Indikator sasaran:

Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran

a. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dengan Indikator sasaran:
   1. Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah
b. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran :
   1. Persentase Peningkatan omzet sector perdagangan

Capaian Kinerja Masing masing Indikator diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dengan Indikator sasaran:
  1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

     Indikator Kinerja Pertambahan Jumlah Industri kecil dan Menengah mentargetkan sebesar 2,2% dan terealisasi sebesar 0,51% dengan Tingkat capaian sebesar 23,18%.
- Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran :

  Persentase Peningkatan omzet sector perdagangan

  indikator Persentase Peningkatan omzet sector perdagangan yang mentargetkan sebesar 6,2% dan terealisasi sebesar 2,73% dengan Tingkat capaian sebesar 44,03%.

II.3. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

| No. | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** | Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan | 90% | 8% | 8,89% |
| | **Penerbitan Tanda Daftar Gudang** | Persentase penerbitan TDG | 90% | 8% | 8,89% |
| | Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | 25 Dokumen | 2 Dokumen | 8% |
| | **Penerbitan Izin** | Jumlah rekomendasi | 2 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses | Dokumen | Dokumen | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0% |
| ***2*** | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | Omzet Perdagangan | *1.089 Milyar* | *296 Milyar* | *27,18%* |
| | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 8 unit | 0 unit | 0% |
| | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 6 unit | 0 unit | 0% |
| | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di** | Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 35 Pasar | 35 Pasar | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Wilayah Kerjanya** | | | | |
| | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | *1 Dokumen* | *0 Dokumen* | 0% |
| *3* | **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | Presentase Kinerja Realisasi Pupuk | 96% | 60% | 62,5% |
| | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 2 Laporan | 50% |
| | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | 4 Laporan | 2 Laporan | 50% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 2 Laporan | 50% |
| | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% | 4 Laporan | 2 Laporan | 50% |
| **4** | **Program Pengembangan Ekspor** | Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor | *60%* | 0% | 0% |
| | **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah pelaku usaha ekspor yang di fasilitasi | *12 Pelaku Usaha* | *0 Pelaku Usaha* | 0% |
| | misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi Dagang bagi produk Ekspor | *10 Pelaku Usaha* | *0 Pelaku Usaha* | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Unggulan | | | |
| | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi | *5 Produk* | *0 Produk* | 0% |
| **5** | **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen** | Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku | *85,55%* | *8,45%* | *9,88%* |
| | **pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan** | Jumlah Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan | 8555 UTTP | 723 UTTP | 8,45% |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang | Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang | 8555 Unit | 723 Unit | 8,45% |
| | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina | *750 Orang* | *101 Orang* | 13,46% |
| *6* | **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri** | Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk | *58,44 %* | *25%* | 42,78% |
| | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk** | Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk | 100 UMKM | 25 UMKM | 25% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **dalam negeri** | Dalam Negeri | | | |
| | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota | 100 UMKM | 25 UMKM | 25% |
| *7* | **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** | Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun | *57%* | *10%* | *17,54%* |
| | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota | *7 Dokumen* | *1 Dokumen* | *14,29%* |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri | *1 Dokumen* | *0 Dokumen* | *0%* |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat | Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat | 2 Dokumen | 0 Dokumen | *0%* |
| | Evaluasi Terhadap | Jumlah Dokumen | *1* | *0* | *0%* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | *Dokumen* | *Dokumen* | |
| | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan | *2 Dokumen* | *1 Dokumen* | *50%* |
| **8** | **Program Pengendalian Izin Usaha Industri** | Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri | 79% | **38,46**% | **48,68%** |
| | **Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri ( IUKI ) dan Izin Perluasan Kawasan Industri ( IPKI ) Kewenangan Kabupaten/Kota** | Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 33 Dokumen | 5 Dokumen | 15,15% |
| | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan | Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan | 7 Dokumen | 5 Dokumen | *71,43%* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | berusaha berbasis risiko | perizinan berusaha berbasis risiko | | | |
| **9** | **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** | Persentase pengelolaan data dalam SIINas | *25%* | 12,54% | 50,16 % |
| | **Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | Jumlah DokumenPenyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 25% |
| | Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis data industri , data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 50% |
| | Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas | Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas | 2 Dokumen | 0 Dokumen | 0% |
| *10* | **Program** | Nilai SAKIP | *85,30* | *82,30* | *96,48%* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | DISPERINDAG | | | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *17 Dokumen* | *15 Dokumen* | *88,23%* |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | *17 Dokumen* | 11 *Dokumen* | 64,71% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | *4 Dokumen* | *1 Dokumen* | *25%* |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *4 Dokumen* | *3 Dokumen* | *75%* |
| | **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *104 Dokumen* | *23 Dokumen* | *22,11%* |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 orang/bulan | 64 orang/bulan | 91,43% |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD | *60 Dokumen* | 52 Dokumen | 86,67% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | *1 Laporan* | *0 Laporan* | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keuangan Akhir Tahun SKPD | SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 25 Laporan | 13 Laporan | 52% |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | *4 Dokumen* | 2 *Dokumen* | 50% |
| | Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 10 Paket | 5 Paket | 50% |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 8 Paket | 6 Paket | 75% |
| | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 12 Paket | 7 Paket | 58,33% |
| | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Dokumen | 6 Dokumen | 50% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | yang disediakan | | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 2 Laporan | 50% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 2 Laporan | 50% |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Unit | 13 Unit | 108,33% |
| | Pengadaan Mebel | jumlah paket mebel yang disediakan | 4 Unit | 0 Unit | 0% |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 25 Unit | 13 Unit | 52% |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah** | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 1 Laporan | 0 Laporan | 0% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang | 1 Laporan | 0 Laporan | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | disediakan | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah | 7 Unit | 33 Unit | *71,43%* |
| | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 Unit | 2Unit | *200%* |
| | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 24 Unit | 10 Unit | *41,67%* |
| | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | 10 Unit | 0 Unit | 0% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 20 Unit | 2 Unit | *10%* |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0% |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | 18 Laporan | 9 Laporan | 50% |

II.4 Analisis Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan

- Capaian Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan Indikator Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan mentargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 8% dengan Tingkat capaian sebesar 8,89%.
- Kegiatan penerbitan tanda daftar gudang dengan Indikator Persentase penerbitan TDG yang diterbitkan mentargetkan sebesar 90% dan terealisasi sebesar 8% dengan Tingkat capaian sebesar 8,89%.
- Sub Kegiatan Fasiitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan mentargetkan sebesar 25 Dokumen dan terealisasi sebesar 2 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 8%.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan Indikator Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses yang diterbitkan mentargetkan sebesar sebesar 2 Dokumen dan terealisasi sebesar 0 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Indikator Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan mentargetkan sebesar sebesar 2 Dokumen dan terealisasi sebesar 0 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

2. Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

   Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan diantaranya :

   1. Pembangunan dan pengeolaan sarana distribusi perdagangan
   2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

   - Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan Indikator omzet perdagangan mentargetkan sebesar 1.089 milyar dan terealisasi sebesar 296 milyar dengan Tingkat capaian sebesar 27,18%.
   - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Indikator Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan

Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar 8 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Dengan Indikator Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang diterbitkan mentargetkan sebesar 6 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan Indikator Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar 35 pasar dan terealisasi sebesar 35 pasar dengan Tingkat capaian sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar 1 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

3. Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terdiri dari 2 yaitu

a. Kegiatan yaitu pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan
   1 Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
   2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
b. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

Berikut dijelaskan masing masing capaian indikator :

1. Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan Indikator Persentase Pengawasan Harga Pokok mentargetkan sebesar 96% dan terealisasi sebesar 60% dengan Tingkat capaian sebesar 62,5%.
2. Capaian Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota mentargetkan sebesar 4

laporan dan terealisasi sebesar 2 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 50%.

3. Capaian Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang diterbitkan mentargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 2 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 50%.
4. Capaian sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota dengan indikator Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota mentargetkan 2 Laporan dan terealisasi 2 laporan dengan tingkat capaian sebesar 100%.
5. Capaian Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator jumlah laporan pengawasan penyaluran dan pengunaan Pupuk dan pestisida bersubsidi mentargetkan sebesar 4 Laporan dan terealisasi sebesar 2 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 50%.
6. Capaian Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan Indikator Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% yang diterbitkan mentargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 2 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 50%.

2 Capaian Program Pengembangan Ekspor dengan indicator Presentase fasiitasi pelaku usaha ekspor menargetkan 60% dan terealisasi sebesar 0% dengan Tingkat capaian sebesar 0%

- Capaian Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten/kota dengan indicator Jumlah pelaku usaha ekspor yang difasilitasi mentargetkan 12 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 0 Pelaku usaha dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Capaian sub kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang di fasiitasi dalam misi dagang produk unggulan mentargetkan 10 pelaku usaha dan terealisasi sebesar 0 Pelaku usaha dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Capaian sub kegiatan peningkatan citra produk dalam negeri dengan indikator jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi

materi promosimentargetkan 5 produk dan terealisasi sebesar 0 Pelaku usaha dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

.

3 Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen.

1. Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan Indikator Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku yang diterbitkan mentargetkan sebesar 85,55% dan terealisasi sebesar 8,45% dengan Tingkat capaian sebesar 9,88%.
2. Capaian kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan Indikator Jumlah Unit Pelaksanaan Metrology Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan mentargetkan sebesar 8555 UTTP dan terealisasi sebesar 723 UTTP dengan Tingkat capaian sebesar 8,45%.
3. Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan Indikator Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang mentargetkan sebesar 8555 unit dan terealisasi sebesar 723 unit dengan Tingkat capaian sebesar 8,45%. Pelaksanaan sidang tera ulang di tribulan III.dan IV

4 Sub kegiatan Pengawasan/penyuluhan metrologi legal dengan Indikator Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina mentargetkan sebesar 750 orang dan terealisasi sebesar 101 orang dengan Tingkat capaian sebesar 13,47%

Capaian Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

1. Capaian program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk mentargetkan sebesar 58,44% dan terealisasi sebesar 25% dengan Tingkat capaian sebesar 42,78%
2. Capaian Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan Indikator Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri mentargetkan sebesar 100 UMKM dan terealisasi sebesar 25 UMKM dengan Tingkat capaian sebesar 25%
3. Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkatkan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri mentargetkan sebesar 100 UMKM dan terealisasi sebesar 25 UMKM dengan Tingkat capaian sebesar 25%.

5 Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri.

1. Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri dengan Indikator Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun mentargetkan sebesar 57% dan terealisasi sebesar 10% dengan Tingkat capaian sebesar 17,54%
2. Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota yang diterbitkan mentargetkan sebesar 7 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 14,29%.
3. Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry dengan indicator jumah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry mentargertkan 1 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
4. Capaian Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat dengan indikator jumah dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat mentargertkan 2 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
5. Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri dengan Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri mentargertkan 1 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
6. Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan mentargertkan 2 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 50%.

6 Capaian Program pengendalian izin usaha industri

1. Capaian Program pengendalian izin usaha industri Indikator Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha Industry di SIINas mentargetkan sebesar 79% dan terealisasi sebesar 38,46% dengan Tingkat capaian sebesar 48,68%.
2. Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industry (UIU), Izin Perluasan Usaha Indstry (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin

Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar 33 Dokumen dan terealisasi sebesar 5 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 15,15%.

3. Capaian Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industry nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA)dengan indikator jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industry nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA) bagi penanaman modal dalam negeri dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menargetkan sebesar 7 Dokumen dan terealisasi sebesar 5 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 71,43%.

7 Capaian Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

1. Capaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan Indikator Persentase Pengelolaan Data dalam SIINas menargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 12,54% dengan Tingkat capaian sebesar 50,16%.
2. Capaian Kegiatan Penyediaan informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyediaan informasi industry untuk informasi industry IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI Kewenanangan Kabupaten/kota yang diterbitkan menargetkan sebesar 4 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 25%.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis data industry, data kawasan industry serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui system informasi industry nasional (SIINas) dengan Indikator Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 50%.

4. Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industry lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas dengan indicator Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan Perusahaan kawasan industry lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar 2 dokumen dan terealisasi sebesar 0 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

8. Capaian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 85,30 dan terealisasi sebesar 82,30

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menargetkan sebesar 17 Dokumen dan terealisasi sebesar 15 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 88,23%

1. Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan menargetkan sebesar 17 Dokumen dan terealisasi sebesar 11 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 64,71%.
2. Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 1 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 25%.
3. Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 3 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 75%
4. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 104 dokumen dan terealisasi sebesar 23 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 22,11%.
5. Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN menargetkan sebesar 70 orang dan terealisasi sebesar 61 orang dengan Tingkat capaian sebesar 87,14%.

6. Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi keuangan SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar 60 dokumen dan terealisasi sebesar 52 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 86,67%
7. Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%
8. Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar 25 laporan dan terealisasi sebesar 13 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 52%.
9. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 4 dokumen dan terealisasi sebesar 2 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 50%.
10. Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan menargetkan sebesar 10 paket dan terealisasi sebesar 5 paket dengan Tingkat capaian sebesar 50%.
11. Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan Indikator Jumlah Paket bahan logistik yang Disediakan menargetkan sebesar 8 paket dan terealisasi sebesar 6 paket dengan Tingkat capaian sebesar 75%.
12. Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang Disediakan menargetkan sebesar 12 paket dan terealisasi sebesar 7 paket dengan Tingkat capaian sebesar 58,33%.
13. Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang Disediakan menargetkan sebesar 12

dokumen dan terealisasi sebesar 6 dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 50%.

14. Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu dengan Indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 2 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 50%.
15. Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 2 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 50%.
16. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah dengan indikator Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah yang disediakan menargetkan 12 unit dan terrealisasi sebesar 13 Unit tingkat capaian sebesar 108,33%
17. Sub Kegiatan Pengadaan mebel dengan indikator jumah paket mebel yang disediakan menargetkan 4 unit terrealisasi sebesar 0 unit tingkat capain sebesar 0%
18. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan mentargetkan sejumlah 25 Unit dan terrealisasi sebesar 13 unit tingkat capaian sebesar 52%.
19. Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang diterbitkan menargetkan sebesar 4 laporan dan terealisasi sebesar 2 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 50%
20. Sub Kegiatan penyedia jasa surat menyurat dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 1 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 100%
21. Sub kegiatan penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
22. Sub Kegiatan penyedia jasa pelayanan umum kantor dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan menargetkan sebesar 1 laporan dan terealisasi sebesar 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%

23. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Indikator Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 7 unit dan terealisasi sebesar 47 unit dengan Tingkat capaian sebesar 671,43%
24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 unit dan terealisasi sebesar 2 unit dengan Tingkat capaian sebesar 200%.
25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan Indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya yang diterbitkan menargetkan sebesar 24 unit dan terealisasi sebesar 10 unit dengan Tingkat capaian sebesar 41,67%.
26. Sub Kegiatan pemeliharaan mebel dengan Indikator Jumlah mebel yang di pelihara menargetkan sebesar 10 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
27. Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara menargetkan sebesar 20 unit dan terealisasi sebesar 2 unit dengan Tingkat capaian sebesar 10%.
28. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar 1 Dokumen dan terealisasi sebesar 0 Dokumen dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
29. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Indikator jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD menargetkan sebesar 18 unit dan terealisasi sebesar 0 unit dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

II.5. realisasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

| No. | Program | Indikator | Kinerja Tahun 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anggaran | Realisasi | Capaian |
| **1** | **Program** | Prosentase pelaku | 39.836.000 | 15.020.190,28 | 37,71% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** | usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan | | | |
| | **Penerbitan Tanda Daftar Gudang** | Persentase penerbitan TDG | 32.461.000 | 14.330.190,28 | 44,15% |
| | Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | 32.461.000 | 14.330.190,28 | 44,15% |
| | **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses | 7.375.000 | 690.000 | 9,36% |
| | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 7.375.000 | 690.000 | 9,36% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***2*** | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | Omzet Perdagangan | 4.495.298.900 | 1.836.280.553,88 | 40,85% |
| | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 4.280.479.900 | 1.769.869.602,48 | 41,35% |
| | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 4.280.479.900 | 1.769.869.602,48 | 41,35% |
| | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 214.819.000 | 66.410.951,40 | 30,91% |
| | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 214.819.000 | 66.410.951,40 | 30,91% |
| *3* | **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | Presentase Kinerja Realisasi Pupuk | 95.181.000 | 20.941.190,28 | *22,00%* |
| | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang** | Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan | 57.531.000 | 18.641.190,28 | 32,40% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota | | | |
| | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | 30.226.000 | 11.405.190,28 | 37,73% |
| | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 27.305.000 | *7.236.000* | *26,50%* |
| | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 37.650.000 | 2.300.000 | *6,11%* |
| | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% | 37.650.000 | 2.300.000 | *6,11%* |
| **4** | **Program** | Presentase | 38.854.000 | 0 | *0%* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pengembangan Ekspor** | fasilitasi pelaku usaha ekspor | | | |
| | **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah pelaku usaha ekspor yang di fasilitasi | 38.854.000 | 0 | *0%* |
| | misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan | 32.133.000 | 0 | *0%* |
| | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi | 6.721.000 | *0* | *0%* |
| **5** | **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen** | Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku | 90.396.800 | 50.730.180,56 | *56,12%* |
| | **pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan** | Jumlah Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan | 90.396.800 | 50.730.180,56 | *56,12%* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | pengawasan | | | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang | Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang | 52.450.800 | 31.129.990,28 | 59,35% |
| | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina | 37.946.000 | 19.600.190,28 | *51,65%* |
| *6* | **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri** | Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk | 207.464.550 | 44.862.181,04 | *21,62%* |
| | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri** | Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 207.464.550 | 44.862.181,04 | *21,62%* |
| | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota | 207.464.550 | 44.862.181,04 | *21,62%* |
| *7* | **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** | Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun | 392.200.000 | *5.880.000* | *1,50%* |
| | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan** | Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana | 392.200.000 | *5.880.000* | *1,50%* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Industri Kabupaten/Kota** | Pembangunan Industri Kabupaten /Kota | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri | 38.360.000 | *640.000* | *1,67%* |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat | Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat | 336.280.000 | 0 | *0%* |
| | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 0 | 0 | *0%* |
| | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan | 17.560.000 | *5.240.000* | *29,84%* |
| **8** | **Program Pengendalian** | Persentase pemantauan dan | 59.502.000 | 14.363.187,88 | 24,14% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Izin Usaha Industri** | pengawasan izin usaha industri | | | |
| | **Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri ( IUKI ) dan Izin Perluasan Kawasan Industri ( IPKI ) Kewenangan Kabupaten/Kota** | Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 59.502.000 | 14.363.187,88 | 24,14% |
| | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko | 59.502.000 | 14.363.187,88 | 24,14% |
| **9** | **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** | Persentase pengelolaan data dalam SIINas | 92.736.000 | 15.380.190,28 | 16,58% |
| | **Penyediaan informasi industri untuk informasi industri** | Jumlah DokumenPenyediaan Informasi Industri | 92.736.000 | 15.380.190,28 | 16,58% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis data industri , data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas | 31.566.000 | 12.455.190,28 | 39,46% |
| | Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas | Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas | 61.170.000 | *2.925.000* | 4,78% |
| *10* | **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | Survei Keputusan Masyarakat | *10.816.299.815* | 4.478.527.328,96 | 41,41% |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi** | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan | 30.896.000 | 17.231.000 | 55,77% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kinerja Perangkat Daerah** | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.926.000 | 17.231.000 | 72,02% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.524.000 | *0* | 0% |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.446.000 | *0* | 0% |
| | **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.820.096.118 | 3.659.007.719,00 | 41,48% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 8.820.096.118 | 3.659.007.719,00 | 41,48% |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD | 49.980.000 | 20.825.000 | 41,67% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | 1.316.000 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.587.000 | 0 | 0% |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 824.970.680 | 347.390.025 | 42,11% |
| | Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 8.998.400 | 4.575.700 | 50,85% |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 46.152.880 | 34.406.675 | 74,55% |
| | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 634.221.400 | 281.648.000 | 44,41% |
| | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 6.000.000 | 2.775.000 | 46,25% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 23.250.000 | *4.428.150* | 19,05% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 106.348.000 | 19.556.500 | 18,39% |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 321.174.005 | *184.160.000* | 57,34% |
| | Pengadaan Mebel | jumlah paket mebel yang disediakan | 7.200.000 | *0* | 0% |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 313.974.005 | *184.160.000* | 58,65% |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah** | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 636.939.812 | 233.184.202,96 | 36,61% |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 381.907.812 | 125.997.871 | 32,99% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang | 250.032.000 | 102.186.331,96 | 40,87% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | disediakan | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah | 176.341.200 | 37.413.382 | 21,22% |
| | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 64.620.000 | 15.809.171 | 24,46% |
| | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 79.176.200 | 10.444.211 | 13,19% |
| | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | 4.995.000 | 4.960.000 | 99,30% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 27.550.000 | 6.200.000 | 22,50% |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah | 5.882.000 | 141.000 | 2,40 % |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada | jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | 5.882.000 | 141.000 | 2,40 % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SKPD | | | | |

II.6 Analisis Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tahun 2025

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
   - Capaian Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan Indikator Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan mentargetkan sebesar Rp. 39.836.000dan terealisasi sebesar Rp. 15.020.190,28 dengan Tingkat capaian sebesar 37,71%.
   - Kegiatan penerbitan tanda daftar gudang dengan Indikator Persentase penerbitan TDG yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 32.461.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.330.190,28 dengan Tingkat capaian sebesar 44,15%
   - Sub Kegiatan Fasiitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 32.461.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.330.190,28 dengan Tingkat capaian sebesar 44,15%.
   - Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan Indikator Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses yang diterbitkan mentargetkan sebesar sebesar Rp. 7.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 690.000 dengan Tingkat capaian sebesar 9,36%.
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Indikator Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diterbitkan mentargetkan sebesar sebesar Rp. 7.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 690.0000 dengan Tingkat capaian sebesar 9,36%.
2. Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
   Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan diantaranya :
   a. Pembangunan dan pengeolaan sarana distribusi perdagangan
   b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- Capaian Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan Indikator omzet perdagangan mentargetkan sebesar Rp. 4.495.298.900 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 1.836.280.553,88 dengan Tingkat capaian sebesar 40,85%
- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Indikator Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar Rp. 4.495.298.900 dan terealisasi sebesar Rp. 1.769.869.602,48 dengan Tingkat capaian sebesar 41,35%
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Dengan Indikator Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp 4.280.479.900 dan terealisasi sebesar Rp. 1.769.869.602,48 dengan Tingkat capaian sebesar 41,35%
- Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan Indikator Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar Rp. 214.819.000 dan terealisasi sebesar Rp. 66.410.951,40 dengan Tingkat capaian sebesar 30,91%
- Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan mentargetkan sebesar Rp. 214.819.000 dan terealisasi sebesar Rp. 66.410.951,40 dengan Tingkat capaian sebesar 30,91%

3. Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

   Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terdiri dari 2 yaitu

   a. Kegiatan yaitu pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan
      1. Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
      2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
   b. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

      Berikut dijelaskan masing masing capaian indikator :

- Capaian Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan Indikator Persentase Pengawasan Harga Pokok mentargetkan sebesar Rp. 95.181.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.941.190,28 dengan Tingkat capaian sebesar 22,00%.
- Capaian Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota mentargetkan sebesar Rp. 57.531.000 dan terealisasi sebesar Rp. 18.641.190,28 dengan Tingkat capaian sebesar 32,40%.
- Capaian Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 30.226.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.405.190,28 dengan Tingkat capaian sebesar 37,73%
- Capaian sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak daam 1 kabupaten/kota dengan indikator Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota mentargetkan Rp. 24.505.000 dan terealisasi Rp. 0 dengan tingkat capaian sebesar 0%
- Capaian Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator jumlah laporan pengawasan penyaluran dan pengunaan Pupuk dan pestisida bersubsidi mentargetkan sebesar Rp. 37.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. *2.300.000* dengan Tingkat capaian sebesar 6,11%
- Capaian Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan Indikator Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% yang diterbitkan mentargetkan Rp. 37.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.300.000 dengan Tingkat capaian sebesar *6,11%.*

4. Capaian Program Pengembangan Ekspor dengan indicator Presentase fasiitasi pelaku usaha ekspor menargetkan Rp. 38.854.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
    - Capaian Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten/kota dengan indicator Jumlah pelaku usaha

ekspor yang difasilitasi mentargetkan Rp. 38.854.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%

- Capaian sub kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang di fasiitasi dalam misi dagang produk unggulan mentargetkan Rp. 32.133.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Capaian sub kegiatan peningkatan citra produk dalam negeri dengan indikator jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi mentargetkan Rp. 6.721.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%

5. Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen.
   - Capaian Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan Indikator Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 90.396.800 dan terealisasi sebesar Rp. 50.730.180,56 dengan Tingkat capaian sebesar 56,12%
   - Capaian kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan Indikator Jumlah Unit Pelaksanaan Metrology Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan mentargetkan sebesar Rp. 90.396.800 dan terealisasi sebesar Rp. 50.730.180,56 dengan Tingkat capaian sebesar 56,12%
   - Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan Indikator Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang mentargetkan sebesar Rp. 52.450.800 dan terealisasi sebesar Rp. 31.129.990,28 dengan Tingkat capaian sebesar 59,35%.
   - Sub kegiatan Pengawasan/penyuluhan metrologi legal dengan Indikator Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina mentargetkan sebesar Rp. 37.946.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.600.190,28 dengan Tingkat capaian sebesar 51,65%
6. Capaian Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
   - Capaian program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk mentargetkan sebesar Rp. 207.464.550 dan terealisasi sebesar Rp. 44.862.181,04 dengan Tingkat capaian sebesar 21,62%
   - Capaian Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan Indikator Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk

dalam Negeri mentargetkan sebesar Rp. 207.464.550 dan terealisasi sebesar Rp. 44.862.181,04 dengan Tingkat capaian sebesar 21,62%.

- Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkatkan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri mentargetkan sebesar sebesar Rp. 207.464.550 dan terealisasi sebesar Rp. 44.862.181,04 dengan Tingkat capaian sebesar 21,62%.

7. Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri.
   - Capaian Program perencanaan dan pembangunan industri dengan Indikator Persentase Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun mentargetkan sebesar Rp. 392.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.880.000 dengan Tingkat capaian sebesar 1,50%
   - Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota yang diterbitkan mentargetkan sebesar Rp. 392.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.880.000 dengan Tingkat capaian sebesar 1,50%.
   - Capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry dengan indicator jumah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry mentargertkan sebesar Rp. 38.360.000 dan terealisasi sebesar Rp. 640.000 dengan Tingkat capaian sebesar 1,67%.
   - Capaian Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat dengan indikator jumah dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat mentargertkan Sebesar Rp. 336.280.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
   - Capaian Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri dengan Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri mentargertkan Sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
   - Capaian Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan mentargertkan

17.560.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.240.000 dengan Tingkat capaian sebesar 29,84%

8. Capaian Program pengendalian izin usaha industri
   - Capaian Program pengendalian izin usaha industri Indikator Persentase Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha Industry di SIINas mentargetkan sebesar Rp. 59.502.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.363.187,88 dengan Tingkat capaian sebesar 24,14%.
   - Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industry (UIU), Izin Perluasan Usaha Indstry (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 59.502.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.363.187,88 dengan Tingkat capaian sebesar 24,14%.
   - Capaian Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industry nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA)dengan indikator jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system informasi industry nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA) bagi penanaman modal dalam negeri dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menargetkan sebesar Rp. 59.502.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.363.187,88dengan Tingkat capaian sebesar 24,14%

9. Capaian Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.
   - Capaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan Indikator Persentase Pengelolaan Data dalam SIINas menargetkan sebesar Rp. 92.736.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.380.190,28 dengan Tingkat capaian sebesar 16,58%
   - Capaian Kegiatan Penyediaan informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Indikator Jumlah dokumen Penyediaan informasi industry untuk informasi industry IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI Kewenanangan Kabupaten/kota yang diterbitkan menargetkan

sebesar Rp. 92.736.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.380.190,28 dengan Tingkat capaian sebesar 16,58%

- Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis data industry, data kawasan industry serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui system informasi industry nasional (SIINas) dengan Indikator Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industry serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 31.566.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.455.190,28 dengan Tingkat capaian sebesar 39,46%
- Sub Kegiatan Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industry lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas dengan indicator Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan Perusahaan kawasan industry lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 61.170.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.925.000 dengan Tingkat capaian sebesar 4,78%.

10. Capaian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
    Capaian Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Survei Keputusan Masyarakat menargetkan sebesar Rp 10.816.299.815 dan terealisasi sebesar Rp 4.478.527.328,96 dengan Tingkat capaian sebesar 41,41%

- Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menargetkan sebesar Rp. 30.896.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.231.000 dengan Tingkat capaian sebesar Rp. 55,77%

- Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan menargetkan sebesar Rp. 23.926.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.231.000 dengan Tingkat capaian sebesar 72,02%
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menargetkan sebesar Rp. 4.524.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 laporan dengan Tingkat capaian sebesar 0%.

- Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan menargetkan sebesar Rp. 2.446.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%.
- Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 8.820.096.118 dan terealisasi sebesar Rp. 3.659.007.719,00 dengan Tingkat capaian sebesar 41,48%
- Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN menargetkan sebesar Rp. 8.820.096.118 dan terealisasi sebesar Rp. 3.659.007.719 dengan Tingkat capaian sebesar 41,48%.
- Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi keuangan SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 49.980.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.825.000 dengan Tingkat capaian sebesar 41,67%.
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 2.632.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 2.587.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 dengan Tingkat capaian sebesar 0%
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 824.970.680 dan terealisasi sebesar Rp. 347.390.025 dengan Tingkat capaian sebesar 42,11%
- Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 8.998.400 dan terealisasi sebesar Rp. 4.575.700 dengan Tingkat capaian sebesar 50,85%

- Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan Indikator Jumlah Paket bahan logistik yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 46.152.880 dan terealisasi sebesar Rp. 34.406.675 dengan Tingkat capaian sebesar 74,55%
- Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 634.221.400 dan terealisasi sebesar Rp. 281.648.000 dengan Tingkat capaian sebesar 44,41%
- Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang Disediakan menargetkan sebesar Rp. 6.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.775.000 dengan Tingkat capaian sebesar 46,25%.
- Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu dengan Indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu menargetkan sebesar Rp. 23.250.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.428.150 dengan Tingkat capaian sebesar 19,05%.
- Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan Indikator Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menargetkan sebesar Rp. 106.348.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.556.500 dengan Tingkat capaian sebesar 18,39%.
- Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan menargetkan sebesar Rp. 321.174.005 dan terrealisasi sebesar Rp. 184.160.000 tingkat capaian sebesar 57,34%.
- Sub Kegiatan Pengadaan mebel dengan indikator  jumah paket mebel yang disediakan menargetkan sebesar Rp. 7.200.000 terrealisasi sebesar Rp.0 tingkat capain sebesar 0%
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan mentargetkan sejumlah Rp. 313.974.005 dan terrealisasi sebesar Rp. 184.160.000 tingkat capaian sebesar 58,65%.
- Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 636.939.812 dan terealisasi Rp. 233.184.202,96 dengan Tingkat capaian sebesar 36,61%
- Sub Kegiatan penyedia jasa surat menyurat dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diterbitkan menargetkan Rp.

5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 dengan Tingkat capaian sebesar 100%

- Sub kegiatan penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 381.907.812 dan terealisasi sebesar Rp 125.997.871 dengan Tingkat capaian sebesar 32,99%.
- Sub Kegiatan penyedia jasa pelayanan umum kantor dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan menargetkan sebesar Rp. 250.032.000 dan terealisasi sebesar Rp. 102.186.331,96 dengan Tingkat capaian sebesar 40,87%
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Indikator Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 176.341.200 dan terealisasi sebesar Rp. 37.413.382 dengan Tingkat capaian sebesar 21,22%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 64.620.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.809.171 dengan Tingkat capaian sebesar 24,46%
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan Indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 79.176.200 dan terealisasi sebesar Rp. 10.444.211 dengan Tingkat capaian sebesar 13,19%.
- Sub Kegiatan pemeliharaan mebel dengan Indikator Jumlah mebel yang di pelihara menargetkan sebesar Rp. 4.995.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.960.000 dengan Tingkat capaian sebesar 99,30%.
- Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara menargetkan sebesar Rp. 27.550.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.200.000 dengan Tingkat capaian sebesar 22,50%.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang diterbitkan menargetkan sebesar Rp. 5.882.000

dan terealisasi sebesar Rp. 141.000 dengan Tingkat capaian sebesar 2,40%.

- Sub Kegiatan  Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Indikator jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD menargetkan sebesar Rp. 5.882.000 dan terealisasi sebesar 141.000 dengan Tingkat capaian sebesar 2,40%.

# BAB III
# FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

## III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

| No. | Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tujuan Meningkatnya Meningkatnya Daya Saing Industri dan Perdagangan | | |
| 2 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri | | |
| 3 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan | | |

## III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

| **No.** | **Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah** | **Faktor Pendorong** | **Faktor Penghambat** |
|---|---|---|---|
| **1** | **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** | | |
| | **Penerbitan Tanda Daftar Gudang** | | |
| | Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang | Sosialisasi bagi pelaku usaha untuk segera mendaftarkan gudang nya | Kurang sadarnya pelaku usaha terkait berkewajiban mendaftarkan gudangnya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Segera terbentuknya Perbup yang disahkan untuk mengatur regulasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan | Belum terbentuknya Perbup yang disahkan |
| ***2*** | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | | |
| | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | |
| | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | Adanya efisiensi anggaran tahun 2025 sehingga pembangunan sarana distribusi perdagangan ditiadakan |
| | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | | |
| | Pembinaan dan | Melaksanakan kegiatan | Akan dilaksanakan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | sekolah pasar bagi pedagang dan pengelola pasar | pada triwulan III |
| *3* | **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | | |
| | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | |
| | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | Untuk komoditi tertentu mendatangkan dari luar Nganjuk, supaya harga tetap stabil | Tidak seimbangnya stok barang dengan permintaan membuat harga melonjak tinggi |
| | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Melaksanakan operasi pasar mendekati Hari Besar Keagamaan bertujuan untuk permintaan konsumen yang meningkat | Tidak semua komoditi barang yang di masukkan dalam operasi pasar |
| | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | |
| | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Pemantauan laporan lebih diperketat pada distributor pupuk bersubsidi | Keterbatasan ruang lingkup pengawasan dalam pendistribusian tepat sasaran |
| **4** | **Program** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Pengembangan Ekspor** | | |
| | **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | |
| | misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan | Melakukan sosialisasi dan mengajak untuk ikut pameran, supaya produk dari pelaku usaha dikenal masyarakat luas | Kurang minatnya pelaku usaha untuk mempromosikan produknya ke luar daerah, untuk undangan misi dagang dari provinsi juga terbatas |
| | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Melakukan sosialisasi dan mengajak untuk ikut pameran, supaya produk dari pelaku usaha dikenal masyarakat luas | Kurang minatnya pelaku usaha untuk mempromosikan produknya ke luar daerah |
| **5** | **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen** | | |
| | **pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan** | | |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang | Publikasi melalui radio, Media Cetak dan Media Elektronik | Pelaku Usaha masih keberatan dengan adanya biaya reparatir |
| | Pengawasan/Penyuluhan | Pengawasan, Sosialisasi melalui | Sosialisasi masih pada pelaku usaha belum |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Metrologi Legal | media cetak (banner dan Leafleat) | menyentuh konsumen |
| *6* | **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri** | | |
| | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri** | | |
| | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota | Sering di ikutkan pameran di luar Kab. Nganjuk, bertujuan untuk memperkenalkan produk lokal dari Kab. Nganjuk | Pelaku usaha sudah merasa puas dengan menjual produknya di lokal daerah sendiri |
| *7* | **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** | | |
| | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dilaksanakan monitoring dan pembinaan kepada IKM dalam kelengkapan sarpras usahanya | Masih adanya pelaku usaha/IKM yang belum memiliki legalitas produk/sarpras |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat | Perlu adanya kesadaran bagi IKM dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan | Peserta pelatihan belum sepenuhnya menggunakan data IKM sesuai klaster |
| | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di | Sebagai bentuk pelindungan bagi masyarakat dari | Keterbatasan informasi terkait fasilitasi jaminan produk halal bagi IKM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | level Kabupaten/Kota | produk yang tidak memenuhi standar jaminan produk halal | |
| **8** | **Program Pengendalian Izin Usaha Industri** | | |
| | **Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri ( IUKI ) dan Izin Perluasan Kawasan Industri ( IPKI ) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | |
| | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Perlu adanya pengawasan, monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha dalam pemenuhan komitmen IUI melalui SIINas | Industri besar, menengah dan kecil belum paham tentang persyaratan mengurus legalitas/Perijinan |
| **9** | **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** | | |
| | **Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Kewenangan Kabupaten/Kota** | | |
| | Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Mengadakan updating data setiap tahun | Belum adanya Data yang valid tentang IKM |
| | Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas | Perlu dilaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha industri dalam penyampaian data aktifitas produksi ke SIINas | Masih kurangnya pelaku usaha industri dalam mengakses SIINas sebagai pengembangan industri |
| *10* | **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | |
| | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| | **Administrasi keuangan Perangkat Daerah** | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | |
| | Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | |
| | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | | |
| | Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | |
| | Pengadaan Mebel | | Masih dalam proses SPJ |
| | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah** | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Di susun diakhir tahun |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | |
| | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | |
| | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | | |
| | Pemeliharaan Mebel | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | |

# BAB IV
# PENUTUP

## IV.1. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi Renja sampai Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa :

1. Tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sudah selaras dengan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026
2. Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dengan Indikator sasaran:
    1. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

       Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang terdata dalam database direktori industri kecil menengah tahun 2025 sejumlah 1580 Industri kecil menengah Sedangkan. Indikator Kinerja Pertambahan Jumlah Industri kecil dan Menengah mentargetkan sebesar 2,2% dan terealisasi sebesar 0,51% dengan Tingkat capaian sebesar 23,18%.
3. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran :

   Persentase Peningkatan omzet sector perdagangan

   indikator Persentase Peningkatan omzet sector perdagangan yang mentargetkan sebesar 6,2% dan terealisasi sebesar 2,73% dengan Tingkat capaian sebesar 44,03%.
6. Capaian realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 16.327.769.065,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.481.985.003,16 tingkat capaian sebesar 39,70%.

## IV.2. Tindak Lanjut

Terhadap beberapa permasalahan yang ada dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada periode berikutnya, terdapat langkah-langkah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti, antara lain:

1. Melaksanakan rapat Evaluasi Setiap bulan untuk Meminimalisir hambatan pencapaian kinerja dan anggaran
2. Melaksanakan Kegiatan sesuai anggaran kas yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

4. Melaksanakan Pencermatan RKA sebelum ditetapkan Target masing- masing sub kegiatan